

DINAMIKA KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN PEMERINTAH PADA ERA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN ALOR

Arif Rahman Antoni
17/422625/PMU/09502

INTISARI

Penyelenggaraan pemerintahan merupakan sesuatu yang dinamis sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang. Kelembagaan pemerintahan daerah mengalami dinamika di antaranya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Salah satu unsur kelembagaan pemerintah daerah yang mengalami dinamika adalah kelembagaan penyuluhan pertanian daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika kelembagaan penyuluhan pertanian pada era Otonomi Daerah di Kabupaten Alor dan dampaknya terhadap kinerja Penyuluh pertanian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Alor berbentuk lembaga teknis daerah yaitu BKP3 pada tahun 2007 kemudian menjadi BP4K2P pada tahun 2014 merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Sesudah itu diubah kembali pada tahun 2016 menjadi organisasi pemerintah daerah yaitu Dinas Pertanian dan Perkebunan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Fungsi yang dijalankan oleh BKP3 yaitu pada bidang ketahanan pangan dan penyuluh pertanian, sedangkan BP4K2P adalah penyuluhan perikanan, pertanian dan kehutanan; sedangkan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan membidangi penyuluhan pertanian. Penyuluh pertanian masa BKP3 dan BP4K2P menjadi pelaksana program dari instansi teknis, sedangkan penyuluh pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan secara langsung menjadi pelaksana program. Dampak dinamika kelembagaan penyuluhan pada kinerja penyuluhan terlihat pada program penyuluhan, yang tetap disusun setiap tahun kemudian dibahas di tingkat BPP dan di Dinas Pertanian dan Perkebunan. Penyuluhan pertanian dilakukan menggunakan metode penyuluhan secara kelompok melalui bimbingan teknis di tingkat BPP. Jumlah kelompok tani di Kabupaten Alor hingga akhir tahun 2019 berjumlah 636 kelompok tani tetapi belum ada yang berada di kelas utama. Salah satu kendala adalah keterbatasan penyuluh pertanian. Dinas Pertanian dan Perkebunan memfasilitasi kelompok tani dalam kemudahan mengakses lembaga keuangan untuk mendapatkan kredit usaha dengan menempatkan fasilitator khusus. Dampak dinamika kelembagaan penyuluhan juga dapat dilihat dengan adanya peningkatan produktivitas komoditas unggulan melalui peluncuran Beras Alor oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan. Strategi untuk meningkatkan kinerja penyuluhan pertanian dilakukan dengan pembentukan UPTD dan penambahan penyuluh pertanian di tingkat desa.

Kata kunci: Otonomi Daerah, Dinamika Kelembagaan, Kinerja Penyuluhan



THE DYNAMICS OF GOVERNMENT AGRICULTURAL EXTENSION INSTITUTIONS IN THE ERA OF REGIONAL AUTONOMY IN ALOR DISTRICT

Arif Rahman Antoni
17/422625/PMU/09502

ABSTRACT

The administration of government is something dynamic with the enactment of laws. Regional government institutions are experiencing dynamics, including the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Government Regulation Number 41 of 2007 concerning Regional Apparatus Organizations which have been regulated through Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus Organizations. One element of local government institutions experiencing dynamics is regional agricultural extension institutions. This study aims to see the dynamics of agricultural extension institutions in the era of regional autonomy in Alor Regency and their impact on the performance of agricultural extension agents. This research uses qualitative methods and descriptive analysis. The results showed that the agricultural extension institution in Alor Regency was in the form of a regional technical institution, namely BKP3 in 2007 then became BP4K2P in 2014 referring to Government Regulation Number 41 of nj2007. After that it was changed back in 2016 to a local government organization, namely the Agriculture and Plantation Service, referring to Government Regulation Number 18 of 2016. The functions carried out by BKP3 are in the field of food security and agricultural extension, while BP4K2P is counseling on agriculture, agriculture and forestry; meanwhile, the Agriculture and Plantation Agency is in charge of agricultural extension. The agricultural extension workers from the BKP3 and BP4K2P period were the program implementers of the technical agencies, while the agricultural extension officers at the Agriculture and Plantation Service were directly implementing the program. The impact of the dynamics of extension institutions on extension performance can be seen in extension programs, which are still compiled every year and then discussed at the BPP level and at the Agriculture and Plantation Agency. Agricultural extension is carried out using the extension method in groups through technical guidance at the BPP level. The number of farmer groups in Alor Regency until the end of 2019 was 636 farmer groups but none of them were in the main class. One of the obstacles is the limitation of agricultural instructors. The Agriculture and Plantation Service Office facilitates farmer groups in easy access to financial institutions to obtain business credit by assigning special facilitators. The impact of the dynamics of extension institutions can also be seen in the increase in the productivity of superior commodities through the launch of Alor Rice by the Agriculture and Plantation Agency. The strategy to improve the performance of agricultural extension is carried out by establishing an UPTD and adding agricultural extension agents at the village level.

Keywords: *Regional Autonomy, Institutional Dynamics, Extension Performance.*